

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Brownlie, Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 3rd edition.
- Gunadi, 2007, *Pajak Internasional*, Jakarta : LP FEUI.
- Hasan, Madjedi, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- H.S, Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni.
- Lubiantara, Benny, 2012, *Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Bakti.
- Pratomo, Eddy, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Bandung: PT. Alumni.
- Pudyantoro, A Rinto, 2012, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta: Petromindo.
- _____, 2014, *Proyek Hulu Migas; Evaluasi dan Analisis Petro Ekonomi*, Jakarta: Petromindo.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI – Press.
- Subekti, R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa.
- Surachmat, Rachmanto, 2005, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tatang, Hasanuddin, 2009, *Pengantar Pajak Internasional, Modul Pelatihan*, Jakarta: BPPK.

Zakaria, Jaja, 2005, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 Staatsblad 1847 No. 23.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

Undang-Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.

Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.12/1978 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Perseroan Dan Pajak Atas Bunga, Dividen Dan Royalty Yang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Melakukan Kontrak *Production Sharing* (Kontrak Bagi Hasil) Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

Surat Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 3985A/39/M.DJM/88 tanggal 23 September 1988 kepada Direktur Utama Pertamina Perihal Syarat-Syarat Baru dan Paket Insentif Kontrak *Production Sharing* (KPS).

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-858/MK.012/1984 tanggal 18 Agustus 1984 kepada Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Perihal Pembagian Hasil (*Oil Split*) dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil yang Baru.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-443a/1982 kepada Menteri Pertambangan dan Energi Tentang Interpretasi Daripada SK Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978.

3. Koran, Makalah dan Jurnal

Rahmany, Fuad, Harian Kontan, 3 Agustus 2011.

Hamzah, Sammy, Harian Kontan, 22 Agustus 2011.

Purwanto, Harry, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum Volume 21*, Yogyakarta: FH UGM.

Pertamina, 1996, *Berbakti Pada Bangsa: Refleksi 50 Tahun Pembangunan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Jakarta: Pertamina.

4. Internet

Direktorat Jenderal Pajak, *Ringkasan Tarif P3B* <http://www.pajak.go.id/content/ringkasan-tarif-p3b>, di akses pada tanggal 21 Agustus 2016.

Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Penjelasan Umum Tarif*, <http://www.kemenkeu.go.id/Bidang/p3b>, diakses pada tanggal 9 Maret 2016.

5. Lain-lain

Direktorat Jenderal Pajak, *Penjelasan Tertulis Sehubungan Sidang Banding Pengadilan Pajak, Nomor: S-7606/PJ.07/2014*, Jakarta : Desember 2014.

Risalah Rapat “Diskusi tentang Kontrak Bagi Hasil terkait *Tax Treaty*” 3-4 April 2014 di Bandung antara Indonesia Petroleum Association (IPA), SKK Migas, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak dan Praktisi/Pemerhati Migas.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, 29 Januari 2002.

Production Sharing Contract Blok X Tahun 1999.